2024 #KolaborasiDalamHarmoni
#AndaTidakSendiri

BANK MSA

TATA KELOLA 2024

DESEMBER 2024

BPRMSA.CO.ID

BANK MSA

Jalan C.Simanjuntak no.26 Terban Gondokusuman Yogyakarta
TELEPON: (0274) 549400

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR MADANI SEJAHTERA ABADI
Alamat	Jalan C.Simanjuntak no.26 Terban Gondokusuman Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 549400

Penjelasan Umum:

BPR Madani Sejahtera Abadi selanjutnya disebut BANK MSA secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. BANK MSA menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri BPR.

BANK MSA telah beroperasi selama 19 tahun dan secara konsisten melakukan perbaikan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transperancy), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen BANK MSA untuk menjadi penyedia layanan perbankan sesuai perkembangan jaman dan membantu memenuhi kebutuhan nasabah di Yogyakarta.

Dalam penerapan Tata Kelola, BANK MSA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus BANK MSA dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank (Stakeholders).
Selama tahun 2024, BANK MSA selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (sustainability).

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum **BAIK**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BANK MSA.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Y. Triagung Pujiantoro

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan.
2. Terkoordinasinya semua aktivitas BPR baik di bidang operasional, pendanaan, perkreditan, pemasaran dan sumber daya manusia.
3. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPR.
5. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Undang-undang
6. Memastikan penerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan factor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat.
8. Mempresentasikan RBB yang telah disusun dihadapan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan setelah disetujui Dewan Komisaris diteruskan kepada OJK.
9. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR yang telah disusun kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi pada BPR.
10. Melaksanakan seluruh Rencana Bisnis BPR yang telah disusun.
11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
12. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham
13. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai.
14. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
15. Memastikan laporan keuangan dapat terlaksana secara tepat waktu dan valid.

2.	Nama	Lisa Sulistyaning Kencanasari

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko, dan APU PPT.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PE

Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko.
3. Pencapaian anggaran sesuai target kerja di bidang Operasional, Funding,SDM, dan Administrasi Kredit.
4. Terjaminnya pelaksanaan aktivitas operasional BPR dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
6. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
7. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
9. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/ atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan APU dan PPT
11. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
12. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,dan/atau otoritas lainnya.
13. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
14. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
15. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Membuat action plan per debitur bermasalah dan time plan rencana penyelesaiannya
2. Rutin tiap triwulan melakukan simulasi dan strest test Mempersiapkan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset khususnya terkait dengan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)
3. Memenuhi dan memperbaiki hal-hal yang menjadi temuan PE AI dan Kepatuhan-MR
4. Melakukan pengkinian data nasabah dan pemantauan terhadap nasabah PEP/ nasabah berisiko tinggi per 3 bulan
5. Evaluasi dan perbaikan analisa oleh AO dan Keputusan kredit oleh Komite Kredit dalam pemberian fasilitas kredit
6. Memperhatikan kondisi likuiditas (disesuaikan dengan pencapaian KYD) dan memberikan suku bunga yang wajar. Membentuk PIC yang mengelola ALCO untuk memaksimalkan pendapatan ABA dan meminimalkan negative spreed
7. Menerapkan GCG dalam setiap kegiatan dan pengelolaan operasional sehari-hari.
8. Menunjuk "Personal In Charge" (PIC / Petugas) yang khusus mengatur keseimbangan kebutuhan dana dan penyaluran dana (penempatan dana dan kebutuhan penyaluran kredit serta menjaga likuiditas), mengatur keseimbangan Asset & Liabilities sehingga diperoleh pendapatan yang optimal

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

	Nama	Yanuar Pudya Madindra

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan.
7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2.	Nama	Hary Purwowidodo

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan.
7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi

1. Membuat action plan per debitur bermasalah dan time plan rencana penyelesaiannya
2. Fokus dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) serta melakukan monitoring pelaksanaannya secara periodik, intensif dan konsisten
3. Mempersiapkan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset khususnya terkait dengan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Aset Produktif terutama terkait dengan cara/sistem perhitungannya di aplikasi CBS
4. Di Semester II Tahun 2024 Lebih diutamakan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dibanding dengan pertumbuhan kredit
5. Melakukan monitoring pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dan Kredit DPK secara periodik, intensif dan konsisten
6. Mempersiapkan dan membuat Rencana Bisnis untuk Tahun 2025 yang realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pencapaian tahun 2024 dan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang ada

Saran

1. Lakukan ANALISA KREDIT oleh AO dan KEPUTUSAN KREDIT oleh Komite Kredit yang LEBIH BAIK dalam pemberian fasilitas kredit
2. Lakukan Penyelamatan/ Restrukturisasi Kredit sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan kelayakan usaha debitur, bukan dalam rangka penyelamatan NPL
3. Menerapkan GCG dalam seluruh kegiatan operasional
4. Melakukan perhitungan dan pembentukan PPAP sesuai ketentuan yang berlaku
5. Memperhatikan dan memperbaiki temuan PE AI dan Kepatuhan- MR yang belum dipenuhi/diperbaiki
6. Melakukan pengkinian data nasabah dan pemantauan terhadap nasabah PEP dan nasabah berisiko tinggi
7. Jadikan RBB 2024 sebagai acuan operasional di tahun 2024 dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja
8. Lakukan Penyelamatan/ Restrukturisasi Kredit sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan kelayakan usaha debitur, bukan dalam rangka penyelamatan NPL
9. Sehubungan dengan Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Penanganan Kredit Bermasalah (dari Relationship Officer/RO kepada Account Officer/AO, Front End/FO dan Back End/ BO) dan pembentukan Bagian/ Divisi IT disarankan maka : Dibuatkan Job Description yang jelas untuk masing- masing struktur organisasi baru tersebut dan Lakukan distribusi debitur bermasalah / menunggak (NPL dan DPK) ke masing-masing PIC (AO; FO; BO) dalam penanganan debitur tersebut sesuai Job Description- nya agar jelas pertanggungjawabannya
10. Selain penanganan setelah menjadi debitur bermasalah, lakukan juga pencegahan agar tidak menjadi debitur bermasalah (pencegahan di awal / pada saat proses kredit) dengan melakukan ANALISA KREDIT oleh AO dan KEPUTUSAN KREDIT oleh Komite Kredit yang LEBIH BAIK dalam pemberian fasilitas kredit
11. Lakukan pencapaian simpanan (khususnya pencapaian Deposito) dengan memperhatikan kondisi likuiditas (disesuaikan dengan pencapaian KYD) dan memberikan suku bunga yang wajar

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPR belum wajib memiliki komite- komite sehingga belum membentuk/ memiliki komite komite sebagai mana dimaksud

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPR belum wajib memiliki komite- komite sehingga belum membentuk/ memiliki komite komite sebagai mana dimaksud

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Hary Purwowidodo
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	Y. Triagung Pujiantoro
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Lisa Sulistyaning Kencanasari
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	Yanuar Pudya Madindra
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Hary Purwowidodo
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	Hary Purwowidodo
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Putera Dana
	Persentase Kepemilikan (%)	3,27

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Y. Triagung Pujiantoro
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Lisa Sulistyaning Kencanasari
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Yanuar Pudya Madindra
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Hary Purwowidodo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Y. Triagung Pujiantoro
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Lisa Sulistyaning Kencanasari
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Yanuar Pudya Madindra
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Hary Purwowidodo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.852.697.400
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp464.400.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp154.800.000
Jumlah Komisaris Penerima	2 orang

Tunjangan	
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp77.400.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp336.274.452
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp144.117.622

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp753.976.700
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp124.408.134

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS bagi masing- masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	5,50 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,50 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,30 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,80 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,80 : 1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Bahasan
1	8 Januari 2024	4	Perubahan struktur organisasi dan penegasan RBB 2024
2	9 Januari 2024	4	Perbaikan kualitas kredit, perkembangan mesin otomasi teller, perbaikan filing admin kredit dan perkembangan ILS
3	5 Februari 2024	4	Persiapan RUPS dan Pembahasan POJK 1 Tahun 2024
4	3 April 2024	15	Penyampaian kinerja triwulan I 2024 oleh Direksi beserta pejabat struktural kepada Dewan Komisaris, penutupan kantor kas, pembahasan tabungan arisan,monitoring pelaksanaan penerapan APU-PPT dan PPSPM
5	4 Juni 2024	6	Kinerja perkreditan sampai dengan Mei 2024
6	10 Juli 2024	15	Penyampaian kinerja triwulan II 2024 oleh Direksi beserta pejabat struktural kepada Dewan Komisaris dan monitoring pelaksanaan penerapan APU-PPT dan PPSPM
7	9 Agustus 2024	5	Perubahan struktur organisasi perkreditan dan perubahan peraturan perusahaan
8	10 September 2024	5	Kinerja perkreditan sampai dengan Agustus 2024
9	7 Oktober 2024	15	Penyampaian kinerja triwulan III 2024 oleh Direksi beserta pejabat struktural kepada Dewan Komisaris dan monitoring pelaksanaan penerapan APU-PPT dan PPSPM
10	10 Oktober 2024	5	Pembahasan temuan PE AI oleh Dekom,Direktur YMFK,PE AI dan PE MR
11	14 Oktober 2024	2	Rapat Dekom pra RBB 2025
12	6 November 2024	5	Kinerja perkreditan sampai dengan Oktober 2024
13	15 November 2024	15	Pembahasan hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2024
14	9 Desember 2024		Persiapan tutup tahun 2024, Persiapan RBB 2025 diawal tahun dan pemenuhan komitmen OJK
15	10 Desember 2024	15	Pembahasan RBB 2025 bersama Direksi dan Pejabat Eksekutif
16	11 Desember 2024	4	Persetujuan RBB 2025

Rapat Dewan Komisaris secara umum telah memenuhi ketentuan minimal rapat yang wajib dihadiri secara tatap muka

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Yanuar Pudya Madindra
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hary Purwowidodo
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Dewan Komisaris selalu hadir secara fisik saat pelaksanaan rapat

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak terdapat Fraud selama tahun 2024

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak terdapat permasalahan Hukum yang dihadapi selama tahun 2024

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Karyawan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	18 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	LazizNU
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian bantuan kambing bersama LazizNU
	Jumlah (Rp)	Rp23.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KEGIATAN SOCIAL BANKING
	Penjelasan Kegiatan	Edukasi Masyarakat
	Jumlah (Rp)	Rp7.866.200
3.	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bantuan sosial
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian beasiswa kepada anak- anak terpilih sesuai kriteria
	Jumlah (Rp)	Rp23.456.300

Pemberian dana hanya untuk Sosial untuk menggerakkan UMKM, beasiswa dan keagamaan, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi MADANI SEJAHTERA ABADI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 April 2025

MADANI SEJAHTERA ABADI

Menyetujui

PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

Y. Triagung Pujiantoro	Yanuar Pudya Madindra
Direktur Utama	Komisaris Utama